

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan menjadi tolak ukur kemakmuran dan kemajuan negara atau daerah. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah agar tercapainya kesejahteraan ekonomi. Atas dasar itulah setiap kegiatan ekonomi dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pembangunan ekonomi yang baik dan terencana. Salah satu yang menjadi indikator pembangunan ekonomi suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu selain pertumbuhan ekonomi, indikator lainnya adalah semakin kecilnya kesenjangan distribusi pendapatan antar penduduk, antar daerah ataupun sektor. Menurut Todaro (2006) komponen pertumbuhan ekonomi terdiri atas tiga hal, pertama yaitu akumulasi modal, akumulasi modal alam hal ini terkait dengan investasi, peralatan fisik dan sumber daya manusia melalui pengoptimalan pada bidang kesehatan dan skil angkatan kerja. Kedua pertumbuhan angkatan kerja yang dilihat dari pertumbuhan dari jumlah penduduk. Ketiga, peranan teknologi dalam aktivitas ekonomi.

Indikator pembangunan ekonomi suatu negara tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi semata melainkan juga harus memperhatikan sisi pembangunan ekonomi. Pertumbuhan harus diiringi dengan pembangunan ekonomi baik dalam cakupan nasional maupun daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan

masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2010).

Era desentralisasi dan otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah diharapkan lebih tanggap untuk dalam mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan ekonomi daerah. Hal ini bisa dioptimalkan dengan memanfaatkan sektor investasi swasta dan juga mengoptimalkan peran dari badan-badan usaha milik daerah. Sehingga dengan adanya peran dari dua sektor tersebut mampu memacu laju pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi. Peranan pembangunan ekonomi daerah tidak hanya bertumpu pada peran pemerintah semata melainkan juga peran masyarakat. Dengan demikian terjadi hubungan timbal-balik antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam kegiatan ekonomi. Sehingga pembangunan ekonomi dapat optimal dan mensejahterakan masyarakat. Pembangunan dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu proses, yang berlangsung terus menerus dalam jangka panjang.

Menurut Sukirno (1996) pengertian pembangunan ekonomi adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan riil perkapita dengan cara peningkatan keterampilan, mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi dan

modal serta teknologi. Disamping pembangunan ekonomi ada juga pertumbuhan ekonomi. Menurut Prawoto (2014) pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan dari produk nasional bruto. Arsyad (2010) mengatakan ekonomi tumbuh ditandai dengan naiknya *Gross Domestic Product (GDP)* maupun *Gross National Product (GNP)* baik itu kenaikannya lebih besar maupun lebih kecil dari rasio pertumbuhan penduduk serta tidak melihat apakah terjadi perubahan dari pola ekonomi atau tidak.

Pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat (Prawoto dan Tribasuki, 2014).

Menurut Sukirno (2004) pertumbuhan ekonomi suatu daerah menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu dalam hal laju pertumbuhan ekonomi antar daerah dan daerah lainnya terdapat perbedaan. Ini dikarenakan setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Menurut Sukirno (2004) ada 4 hal yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, pemikiran ini didasari pada pandangan ekonom klasik dan neo klasik, yaitu, tanah serta kekayaan

alam, penduduk dan tenaga kerja serta kualitas dari penduduk, ketersediaan barang modal serta teknologi yang digunakan.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017 laju pertumbuhan beberapa provinsi di Indonesia cenderung fluktuatif hal ini dikarenakan ada beberapa provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi disisi lain ada juga provinsi-provinsi yang justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat. Secara nasional laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan. Data dari BPS menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,07 persen pada tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 merupakan angka tertinggi sejak 2014 yang hanya tumbuh 5,02 persen (BPS, 2017). Angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017 dengan laju pertumbuhannya yaitu sebesar 7,23 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi menjadi faktor yang diperhatikan dalam pembangunan ekonomi. Akan tetapi tidak hanya laju pertumbuhan saja yang diperhatikan tetapi juga ketidakmerataan dari distribusi pendapatan. Selain laju pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan ekonomi ada hal lain yang juga perlu diperhatikan yaitu masalah tidak meratanya distribusi pendapatan. Oleh sebab itu menjadi bias ketika suatu wilayah mengalami pertumbuhan ekonomi tetapi juga terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Untuk mengetahui besaran ketimpangan pendapatan digunakanlah Indeks Gini sebagai metode perhitungan. Indeks Gini ditunjukkan dengan angka 0 – 1. Nol berarti distribusi pendapatan

terdistribusikan secara merata atau dengan kata lain pemerataan sempurna. Sedangkan 1 berarti distribusi pendapatan tidak merata atau terjadi ketimpangan. Indeks Gini berkisar dari angka 0 (kemerataan sempurna) sampai angka 1 (ketidakmerataan sempurna). Oleh karena itu apabila indeks Gini suatu wilayah telah mencapai angka 0,4 maka dapat disimpulkan bahwa wilayah tersebut mengalami ketimpangan yang parah.

Berdasarkan data dari BPS Gini Rasio Indonesia pada Maret 2017 sebesar 0,393. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia Maret 2017 menurun jika dibanding Gini Ratio September 2016 sebesar 0,394. Pada tahun 2017 DIY memiliki nilai Gini Ratio tertinggi, yaitu sebesar 0,432. Sedangkan Provinsi Bangka Belitung Gini Rasionya sebesar 0,282, ini artinya Bangka Belitung memiliki ketimpangan terendah (lebih merata) pengeluaran penduduknya jika dibanding 33 provinsi yang lain. Provinsi dengan gini rasio tertinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Provinsi dengan gini rasio tertinggi di Indonesia

Provinsi	Gini Rasio
1. DI Yogyakarta	0,432
2. Gorontalo	0,430
3. DKI Jakarta	0,413
4. Sulawesi Selatan	0,407
5. Jawa Barat	0,403
6. Papua	0,397
7. Jawa Timur	0,396
8. Sulawesi Utara	0,396
9. Sulawesi Tenggara	0,394

Sumber: BPS 2017

Dari tabel diatas DIY merupakan provinsi dengan Gini Rasio tertinggi di Indonesia yaitu dengan gini rasio sebesar 0,432, Gorontalo

sebesar 0,43, DKI Jakarta sebesar 0,413, Sulawesi Selatan sebesar 0,407, Jawa Barat sebesar 0,403, Papua sebesar 0,397, Jawa Timur sebesar 0,396, Sulawesi Utara sebesar 0,396, dan Sulawesi Tenggara dengan Gini Ratio sebesar 0,394. Dari data diatas terdapat 5 provinsi dengan tingkat ketimpangan tinggi karena gini rasio diatas 4. Sementara itu terdapat 5 provinsi dengan ketimpangan terendah di Indonesia yaitu Sumatera Barat sebesar 0,318, Maluku Utara sebesar 0,317, Sumatera Utara sebesar 0,315, Kalimantan Utara sebesar 0,308, dan Bangka Belitung sebesar 0,282.

Data indeks gini menurut provinsi-provinsi di Indonesia pada tahun 2017, DIY merupakan provinsi dengan angka indeks gini tertinggi. Ha ini berbanding terbalik dengan pencapaian laju pertumbuhan ekonominya. Laju pertumbuhan ekonomi DIY justru menempati posisi terbawah dari laju pertumbuhan provinsi-provinsi yang ada di pulau Jawa. Berdasarkan data BPS (2016) laju pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 5,05 persen, jauh dibawah DKI Jakarta sebagai provinsi dengan laju pertumbuhan tertinggi di pulau Jawa pada tahun 2016 dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,85 persen. Sementara 4 provinsi masing-masing memiliki laju pertumbuhan diatas laju pertumbuhan DIY. Masalah ketimpangan di DIY menjadi menarik untuk diteliti hal ini dikarenakan ketimpangan yang terjadi di DIY sangat tinggi sedangkan pertumbuhan ekonominya yang relatif rendah dibanding wilayah lainnya khususnya jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang ada di pulau Jawa.

Permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Oleh karena itu, permasalahan ini sangat mendesak untuk segera diatasi. Sebelumnya perlu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan sehingga nantinya langkah yang dilakukan lebih efisien dan tepat sasaran. Untuk mengukur kualitas dan keberhasilan pembangunan manusia adalah dengan melihat indeks pembangunan manusia (IPM). Salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan adalah kualitas sumber daya manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian oleh Sara Purnasihar (2012) dengan menggunakan variabel IPM, hasilnya penelitiannya menyatakan bahwa IPM signifikan mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Pengaruh IPM dalam penelitian Sarah Purnasihar (2012) positif dimana ketimpangan akan meningkat seiring dengan terjadinya peningkatan IPM di Indonesia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fulgsang (2013) faktor rata-rata lama sekolah dengan usia diatas 25 menyebabkan ketimpangan di daerah sub-Saharan Afrika. Penelitian Arif & Wicaksani (2017) yang melakukan penelitian tentang ketimpangan pendapatan provinsi Jawa Timur dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dihasilkan bahwa variabel IPM berpengaruh terhadap kenaikan ketimpangan pendapatan.

Menurut Fulgsang (2013) pertumbuhan penduduk menyebabkan ketimpangan. Ini dikarenakan ketika terjadi peningkatan jumlah

penduduk kemudian tidak diimbangi dengan peningkatan aktivitas ekonomi. Kemudian juga dengan angka kelahiran yang tinggi data menyebabkan berkurangnya pendapatan perkapita dan juga menyebabkan meningkatnya beban ketergantungan masyarakat serta juga dipengaruhi oleh bertambahnya usia non produktif. Penelitian yang dilakukan oleh Vredrich Bantika dkk (2015) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Utara menggunakan variabel Jumlah Penduduk, hasilnya Jumlah Penduduk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Susi Lestari (2016) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur, menggunakan variabel jumlah penduduk, hasilnya jumlah penduduk mempengaruhi ketimpangan dimana ketika penduduk meningkat maka akan meningkatkan ketimpangan.

Ketimpangan distribusi pendapatan dipengaruhi oleh perubahan tingkat kemakmuran dari waktu ke waktu. Pencapaian PDRB perkapita digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat kemakmuran suatu wilayah. Fuglsang (2013) dalam penelitiannya PDRB per kapita mempengaruhi ketimpangan. Kenaikan PDRB per kapita menurunkan ketimpangan di Sub Saharan Afrika. Penelitian serupa juga dikemukakan oleh dari Sultan dan Sodik (2010) yang menganalisis ketimpangan di-Jawa Tengah serta faktor yang mempengaruhinya menggunakan variabel PDRB per kapita. Hasil penelitiannya, pertumbuhan dari PDRB perkapita

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan regional di DIY dan Jawa Tengah yang artinya peningkatan PDRB perkapita mengakibatkan penurunan ketimpangan distribusi pendapatan.

Sementara menurut penelitian Silviya Bratoeva-Manoleva (2017) yang melakukan penelitian tentang ketimpangan pendapatan di Bulgaria. Selama periode 1990-2015, ada korelasi langsung antara variable PDB per kapita dan ketimpangan pendapatan di Bulgaria. Peningkatan PDB per kapita di Bulgaria menyebabkan kenaikan ketimpangan pendapatan. Hal itu berarti bahwa manfaat dari pembangunan ekonomi Bulgaria tidak didistribusikan secara merata di antara penduduk. Penelitian juga dilakukan oleh Munir & Sultan (2017) mengenai ketimpangan pendapatan di India dan Pakistan. Hasil penelitiannya, peningkatan PDB perkapita akan menaikkan ketimpangan pendapatan.

Ketimpangan distribusi pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sehingga antara satu daerah dan daerah lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda pula. Hal ini disebabkan setiap daerah atau wilayah memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda yang bias dikembangkan. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Determinan Ketimpangan Ekonomi Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh IPM terhadap Indeks Gini di DIY?
2. Bagaimana pengaruh PDRB per kapita terhadap Indeks Gini di DIY?
3. Bagaimana pengaruh Populasi terhadap Indeks Gini di DIY?
4. Bagaimana pengaruh IPM, PDRB per kapita dan Populasi Penduduk secara bersamaan terhadap Indeks Gini di DIY?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui pengaruh IPM terhadap Indeks Gini di DIY.
2. Mengetahui pengaruh PDRB per kapita terhadap Indeks Gini di DIY.
3. Mengetahui pengaruh populasi terhadap Indeks Gini di DIY.
4. Mengetahui pengaruh IPM, PDRB per kapita dan Populasi secara bersamaan terhadap Indeks Gini di DIY.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini ini diharapkan dapat menambah kajian teoritis yang berkaitan dengan bidang ekonomi terutama mengenai determinan ketimpangan ekonomi di DIY. Serta penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan kepada penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah DIY dan kabupaten/kota untuk menerapkan kebijakan yang baik guna mencapai pembangunan daerah yang diinginkan.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana latihan guna menerapkan ilmu yang diperoleh pada perkuliahan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan peneliti mengenai determinan ketimpangan ekonomi.